

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu tantangan yang akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia diwaktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan sistim politik yang demokratis. Tantangan ini sekaligus akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan Politik Dalam Negeri, yang pada dasarnya berdemensi dua, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistim politik demokrasi. Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok perlu melakukan reposisi dan reorientasi secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan strategi yang bergerak cepat dan sulit diprediksi. Reposisi dan reorientasi tersebut akan dapat dilakukan dengan efektif, jika segenap jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok mampu melakukan perubahan paradigmatis dan mengembangkan perilaku birokrasi yang visioner. Ini mengandung makna, bahwa segenap jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut agar mampu mengimplementasikan tugas dan fungsi secara profesional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada Instrumen Rencana Strategis.

Rencana Strategis ini dimaksud sebagai suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis ini memuat Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok, serta sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban Misi dan mewujudkan Visi melalui suatu rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan

program-program strategis yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang ada.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok disusun berdasarkan Kebijakan Daerah yang diselaraskan dengan kebijakan Nasional yang diarahkan untuk mempertahankan Persatuan dan Kesatuan serta mewujudkan sistem Politik yang demokratis dalam rangka memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu kepada Bhinneka Tunggal Ika.

Menyelesaikan masalah masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memasyarakatkan dan menerapkan prinsip anti diskriminasi dalam kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Solok.

Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab, yang lebih dipopulerkan lagi dengan pemilu badunsanak.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
6. Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD;
7. Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

8. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
11. TAP MPR No. VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
12. TAP MPR No. VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
13. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
15. Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan;
16. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Perda Kabupaten Solok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan memperhatikan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan.

#### **2. Tujuan**

Tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I PENDAHULUAN yang berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD yang berisi mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI yang berisi mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN yang berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan fondasi bagi kelangsungan pemerintahan dan Pembangunan Nasional. Namun secara objektif, karakteristik Daerah yang dibangun di atas kemajemukan, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal. Kondisi kemajemukan masyarakat daerah yang rawan konflik dapat diminimalkan dengan kebijakan publik yang memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang tidak terlalu signifikan.

Pembangunan yang belum lagi merata yang terjadi selama ini ternyata telah menjadi pemicu penyebab konflik sosial dan menguatnya gejala disentrigrasi bangsa seperti yang terjadi di Propinsi dan Kabupaten lain hal ini bisa saja terjadi di Kabupaten Solok walaupun persatuan dan kesatuan telah terpelihara baik selama ini, pembangunan yang bersifat fisik masih memerlukan perhatian yang serius, karena pembangunan itu sendiri harus sejalan dengan pembangunan mental dan spritual sesuai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga, tuntutan terhadap kemajuan pembangunan tidak lagi menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang diharapkan akan dapat saling menopang guna meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sementara itu pengaruh globalisasi antara lain terwujud dalam arus informasi yang begitu deras yang membawa masyarakat kearah keterbukaan disamping berdampak positif bagi kemajuan bangsa, juga berdampak positif terhadap ketahanan Nasional.

Dengan bergulirnya era reformasi adalah merupakan perubahan secara mendasar dalam pembangunan sistem politik Nasional, perubahan tersebut lebih mengutamakan menegakkan kedaulatan rakyat, perlunya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, pembangunan di bidang politik di fokuskan untuk meningkatkan, mengembangkan budaya politik yang demokratis, penegakkan hukum dan menghormati HAM berdasarkan pancasila dan UUD 1945 pada akhir-akhir ini pengembangan sistim politik yang demokratis telah berjalan sedemikian baik itu dapat kita lihat ditingkat pemerintahan maupun ditingkat masyarakat.

Kehadiran banyak partai politik saat ini disatu sisi menaruh harapan optimis bagi masyarakat untuk bersaing secara demokratis dan dinamis untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di legislatif, tetapi di balik semua ini terjadi pula kebingungan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya karena begitu banyak partai dan beberapa hal yang telah menjadi opini di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa para wakil yang mereka pilih belum dapat secara utuh menyampaikan aspirasi mereka.

Organisasi Kemasyarakatan yang cenderung bertambah banyak merupakan pemusatan dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat untuk itu perlu dikembangkan komunikasi timbal balik diantara sesama ormas dan antara ormas dengan pemerintah, sehingga program dan kegiatan ormas bisa disejalankan dengan program pemerintah dan selanjutnya ormas bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam

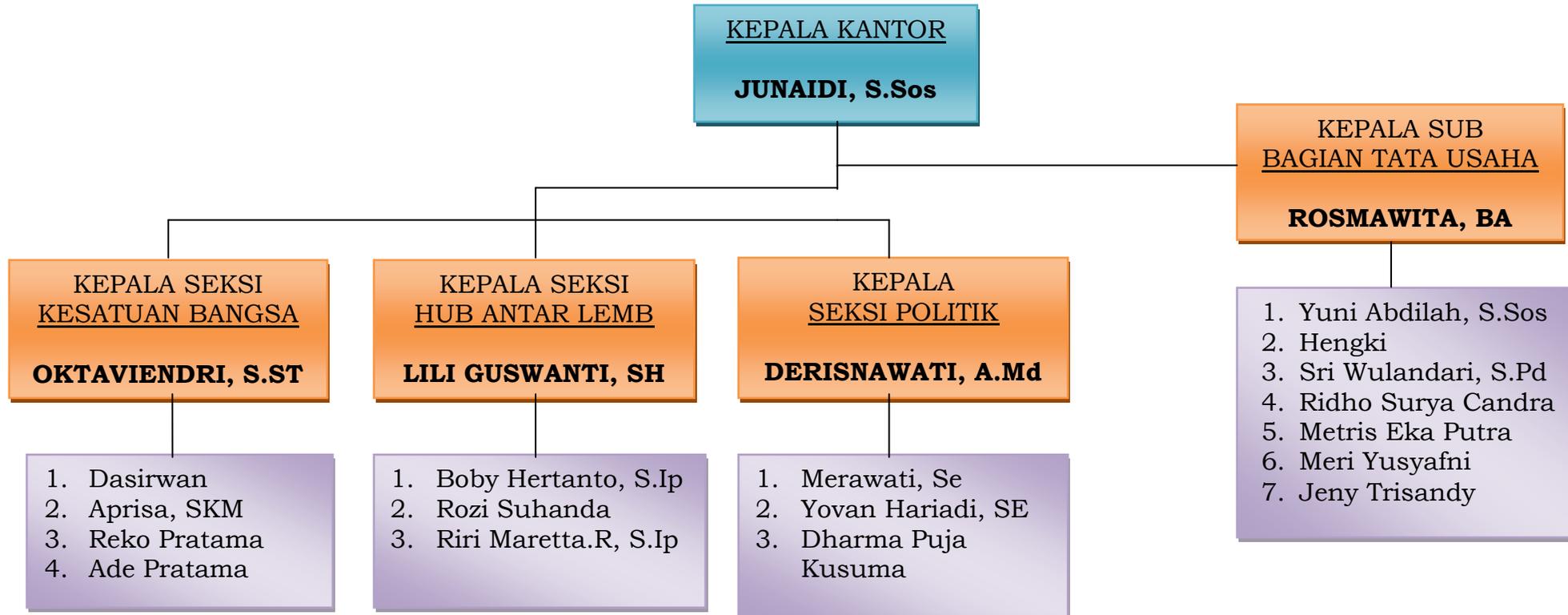
Permendagri Nomor 44 Tahun 2009. Diharapkan pada setiap provinsi, Kabupaten / Kota agar melakukan pembinaan terhadap ormas, orsospol yang ada di daerah dengan mengadakan kerja sama di bidang tertentu serta mengikut sertakan mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Daerah Kabupaten Solok yang dilintasi bukit barisan yang membujur dari utara ke selatan, sehingga keadaan topografisnya sangat bervariasi mulai dari datar, landai dan curam serta pegunungan, dengan ketinggian mencapai 2.912 Meter diatas permukaan laut dan berada pada pertemuan lempeng indo australia dan Eroasia serta dilintasi patahan semangka. Kabupaten Solok karena lokasi dan kondisi geografis termasuk daerah rawan bencana antara lain banjir, tanah longsor, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik dan kebakaran maka dari itu diperlukan kewaspadaan yang tinggi dari seluruh step older dan masyarakat Kabupaten Solok, bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana dan terkoodinir, terpadu, cepat dan tepat.

Perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industrialisasi di daerah menuntut penyediaan bahan baku yang makin meningkat. Hal ini menimbulkan kecendrungan untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang kita miliki tidak menutup kemungkinan timbulnya kerusakan alam, untuk itu kedepan kita berharap dari setiap perizinan yang akan kita keluarkan perlu terlebih dahulu kita lakukan pengkajian yang mendalam dari aspek kerugian dan keberuntungan pada masyarakat dan daerah, kesemuanya itu disatu pihak mempunyai nilai yang positif karena dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun disisi lain dapat menjadi ancaman yang menimbulkan bencana yang secara alamiah tidak dapat dielakkan kecuali hanya memperkecil kemungkinan resiko akibat bencana yang ditimbulkan.

Struktur organisasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 7 tahun 2010 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEADAAN JANUARI 2017**



Kantor Kesatuan Bangsa dan politik selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpol merupakan unsur pendukung Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kantor Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangannya. Adapun fungsi dan tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor 7 tahun 2010 adalah :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Pemberian dan Pelayanan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- 3) Pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta Lembaga Nirlaba Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan memfasilitasi pengembangan sistim politik yang demokratis. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dewasa ini dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi seperti tersebut diatas juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kurangnya personil yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu tentang politik, hal ini adalah salah satu penyebab.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah persoalan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor terjadinya keterlambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok juga memiliki momentum yang sangat strategis, mengingat faktor-

faktor yang positif yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerja, faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong.

Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini kami paparkan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas yaitu :

### **1. Kekuatan Pendorong :**

#### **a. Kondisi Politik**

1. Makin terbukanya komunikasi politik antar Infra dan Supra Struktur Politik.
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai aset pembangunan Daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian organisasi kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi Politik masyarakat.

#### **b. Kondisi Sosial Budaya**

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya Nasional.
2. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya Kehidupan Sosial Budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minang Kabau yaitu Adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah.
4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap latensi bahaya Ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Makin meningkatnya pengembangan Wawasan Kebangsaan ditengah kehidupan bermasyarakat.

**c. Kondisi Ekonomi**

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian Daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan Sumber Daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian Daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Propinsi yang kaya Sumber Daya Alam.
5. Penduduk Kabupaten Solok yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

**d. Kondisi Keamanan / Ketentraman**

1. Terkoordinasinya penanganan masalah – masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

**2. Kekuatan Penghambat**

**a. Kondisi Politik**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik daerah dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya Infra Struktural Politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.

3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak respon terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang belum menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

**b. Kondisi Sosial**

1. Belum mantapnya Wawasan Kebangsaan dikalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

**c. Kondisi Ekonomi**

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian Daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan Daerah karena belum intensifnya penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah ( seperti daerah Perkebunan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya dengan baik aset Daerah.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

#### **d. Kondisi Keamanan / Ketentraman**

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang mengancam anarkhis dan berdampak mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan;
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap pendatang asing;
4. Belum optimalnya kemampuan masyarakat dan aparat khususnya aparat Satuan Linmas dalam penanggulangan bencana baik bencana alam maupun bencana ulah manusia dan Penanganan Pengungsi.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan serta Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

## **2.2 SUMBER DAYA KANTOR KESBANGPOL**

### **a. Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan/Kantor Kabupaten Solok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan politik dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Solok. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok terdiri dari :

- A. Kepala Kantor
- B. Sub. Bagian Tata Usaha
- C. Kasi Kesbang
- D. Kasi Hubungan Antar Lembaga
- E. Kasi Politik

Secara keseluruhan , komposisi jabatan menurut eselon dalam Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok :

- a. Eselon III : 1 Jabatan
- b. Eselon IV : 4 Jabatan

**c. Personil**

Komposisi personil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini pada Januari 2017 berjumlah sebanyak 22 Orang yang terdiri dari 8 Orang PNS dan 14 Orang Tenaga Harian Lepas :

**TABEL 1**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>KET</b>
1	SD			
2	SLTP			
3	SLTA	7	31.8	
4	D.III	2	9.09	
5	S.1	9	40.9	
6	S.2	-	0	
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>100</b>	

**TABEL 2**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**MENURUT PANGKAT / RUANG GOLONGAN**

<b>NO</b>	<b>RUANG GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>KET</b>
1	I/a	-	-	
2	I/b	-	-	
3	I/c	-	-	
4	I/d	-	-	
5	II/a	-	-	
6	II/b	-	-	
7	II/c	1	12.5	
8	II/d	-	-	
9	III/a	2	25	
10	III/b	2	25	
11	III/c	1	12.5	
12	III/d	2	25	
13	IV/a	-	-	
14	IV/b	-	-	
15	IV/c	-	-	
16	IV/d	-	-	
Jumlah		8	100	

**TABEL 3**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KESARJANAAN**

<b>NO</b>	<b>KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU</b>	<b>JUMLAH</b>
A.	SARJANA	
	Sarjana Sosial	2
	Sarjana Sains Terapan	1
	Sarjana Hukum	1

	Sarjana Ekonomi	2
	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1
	Sarjana Ilmu Politik	2
	Sarjana Pendidikan	1
B.	SARJANA MUDA	
	Bahasa Inggris	1
	Pariwisata	1
C.	SMA	7
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

**d. Aset**

Aset yang terdapat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

**TABEL 3**

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG/BANGUNAN PER UNIT  
PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN SOLOK**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ISIAN</b>	<b>SATUAN</b>
<b>I LUAS</b>			
1	Luas bangunan	526,1	M2
2	Luas dasar bangunan	413	M2
3	Jumlah lantai	1	Lantai
4	Type	Permanen	
5	Tahun selesai di bangun		
6	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)		
	a No		
	b Tanggal		
<b>II LOKASI</b>			
7	a Provinsi	Sumatera Barat	
	b Kabupaten/Kota	Solok	
	c Kecamatan	Gunung Talang	
	d Kelurahan/Desa/nagari	Batang Barus	
	e Jalan	Jl.Raya Solok – Padang	

	f	RT/RW/RK		
<b>III</b>		<b>PENGADAAN</b>		
8	a	Tanggal perolehan		
	b	Kondisi	B/RR/RB	
	c	Harga perolehan	Rp 577.653.000	
	d	Dasar harga	Perolehan/taksiran 379.357.000	
	e	Sumber dana	APBD/NON APBD	
	f	No		
	g	Tanggal perolehan		
<b>IV</b>		<b>NILAI/HARGA LAINNYA</b>		
9	a	Nilai wajar	Rp.....	
	b	NJOP	Rp.....	
10		Catatan: peroleh gedung kantor adalah eks BKD Kabupaten Solok yang berasal dari labor Dinas PU Provinsi Sumatera Barat		

**TABEL 4**  
**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PER UNIT**  
**PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN SOLOK**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ISIAN</b>	<b>SATUAN</b>
<b>I</b>			
<b>LUAS</b>			
1	Luas Tanah Seluruhnya	980	M2
2	Luas Tanah Untuk Bangunan (Jalan, taman dan lain-lain)	526,1	M2
3	Luas Tanah untuk sarana lingkungan	453,9	M2
4	Luas tanah kosong		M2
<b>II</b>			
<b>LOKASI</b>			
5	a	Provinsi	Sumatera Barat
	b	Kabupaten/Kota	Solok

	c	Kecamatan	Gunung Talang	
	d	Kelurahan/Desa/Nagari	Batang Barus	
	e	Jalan	Jl.Raya Solok-Padang	
	f	RT/RW/RK		
<b>III</b>		<b>TANDA-TANDA BATAS TANAH</b>		
6	a	Utara	Gedung PKK. Kab Solok	
	b	Timur	Mushala	
	c	Selatan	Jl.komplek perkantoran	
	d	Barat	Jl.komplek perkantoran	
<b>IV</b>		<b>DOKUMEN KEPEMILIKAN</b>		
7	a	Nomor	Hak pakai NO.3/2001	
	b	Tanggal	27-12-2001	
	c	Instansi Penerbit	Pemerintah Kab. Solok	
<b>V</b>		<b>PENGADAAN</b>		
8	a	Tanggal perolehan	27-12-2001	
	b	Harga per M2	Rp. 225.000	
	c	Harga seluruhnya	Rp. 10.963.125.000	
	d	Dasar harga	Perolehan/taksiran	
	e	Sumber dana	APBD/NON APBD	
	f	Nomor		
	g	Tanggal perolehan		
<b>VI</b>		<b>NILAI/HARGA LAINNYA</b>		
9		Nilai taksiran		
	a	Harga per M2	Rp. 550.000	
	b	Harga seluruhnya	Rp. 539.000.000	
		NJOP		
	a	Harga per M2	Rp. 394.000	
	b	Harga seluruhnya	Rp. 386.120.000	

10	Catatan: lokasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok tergabung dalam satu sertifikat tanah kompleks perkantoran		
----	--	--	--

**TABEL 5**

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS  
PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN SOLOK**

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK/TYP E	NOMOR IDENTITAS				NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU 2015	KET
						POLISI	BPKB	RANGKA	MESIN			
1	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	02.03.01. 02.03		2003	Kijang/SX	BA 47 H	C No.4730241 C	MHF11KF703004 0245	7K-0592500	135,000,000		
2	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	02.03.01. 02.03		2015	TOYOTA RASH 1500 S VVTI/RUSH G Type	BA 1553 H	L 06617063	MHFE2CJ3JFK10 6055	3SZ DFR7732	223,790,000		
3	Sepeda Motor	02.03.01. 05.01		2013	MEGA PRO/HONDA	BA 3084 H	K-02275853	MH1KC3110DK30 3311	KC31E1302 030	19,205,330		
4	Sepeda Motor	02.03.01. 05.01		2013	MEGA PRO/HONDA	BA 3050 H	K-02275852	MH1KC3118DK30 3332	KC31E1302 020	19,205,330		
5	Sepeda Motor	02.03.01. 05.01		2013	MEGA PRO/HONDA	BA 3048 H	K-02275851	MH1KC3113DK30 3318	KC31E1302 050	19,205,330		
6	Sepeda Motor	02.03.01. 05.01		2013	VARIO/HONDA	BA 3088 H	K-02275854	MH1JFF118DK15 2934	JFF1E1151 824	16,135,640		

**TABEL 6**  
**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN**  
**PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN SOLOK**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>NILAI PEROLEHAN</b>	<b>NILAI BUKU 2015</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Gerobak Dorong	2011	-	400,000		
2	Receiver	2009	-	3,900,000		
3	Lemari Penyimpanan	2009	-	250,000		
4	Mesin ketik manual standar (14-16)	2006	Olimvia	-		
5	Mesin ketik manual standar (14-16)	2007	Olimvia	-		
6	Mesin ketik manual standar (14-16)	2004	Olimvia	1,450,000		
7	Filling besi/metal	2006	Mustang	1,000,000		
8	Filling besi/metal	2009	Top	1,500,000		
9	Filling besi/metal	2011	Top	5,720,000		
10	Filling besi/metal	2012	-	3,150,000		
11	Filling besi/metal	2011	-	1,430,000		
12	Lemari kayu	2011	-	4,048,000		
13	Papan nama instansi	2009	-	1,500,000		
14	Papan tulis	2009	-	1,500,000		
15	Meja rapat	2011	-	6,787,000		
16	Meja tulis	2000	-	2,000,000		
17	Meja tulis	2003	-	400,000		
18	Meja tulis	2009	-	325,000		
19	Meja tulis	2005	-			

				400,000		
20	Meja tulis	2009	-	650,000		
21	Meja tulis	2005	-	400,000		
22	Meja tulis	2009	-	325,000		
23	Kursi rapat	2000	-	480,000		
24	Kursi rapat	2011	-	5,236,000		
25	Kursi rapat	2000	-	160,000		
26	Kursi rapat	2014	Futura	24,904,000		
27	Kursi tamu	1995	-	-		
28	Kursi putar	2012	-	3,850,000		
29	Kursi putar	2000	-	1,000,000		
30	Kursi putar	2000	-	1,000,000		
31	Kursi biasa	2000	-	-		
32	Meja komputer	2007	-	150,000		
33	Meja komputer	2005	-	150,000		
34	Tikar/Karpet	2011	-	3,872,000		
35	Meja biro	2000	-	700,000		
36	Kursi kerja	2004	-	850,000		
37	Kursi kerja	2009	-	700,000		
38	Mesin penghisap debu/vacuum cleaner	2015	Modena	1,800,000		
39	AC unit	2009	-	3,700,000		
40	Kipas angin	2009	-	700,000		
41	Dispenser	2009	-	700,000		
42	Dispenser	2009	-	350,000		
43	Televisi	2009	LG	2,500,000		

44	Wireless	2014	High power	5,000,000		
45	Tiang bendera	2009	-	1,500,000		
46	Personal komputer lain-lain	2011	-	600,000		
47	P.C Unit/Komputer PC	2003	Samsung	12,000,000		
48	P.C Unit/Komputer PC	2007	Samsung	7,400,000		
49	P.C Unit/Komputer PC	2005	Samsung	6,000,000		
50	P.C Unit/Komputer PC	2013	Asus	5,000,000		
51	Laptop	2013	Toshiba	4,400,000		
52	Laptop	2014	Toshiba	5,775,000		
53	Note Book	2011	HP	9,500,000		
54	Note Book	2012	Samsung	8,000,000		
55	Note Book	2013	Acer	5,800,000		
56	Printer	2012	HP	1,850,000		
57	Printer	2013	Epson	2,500,000		
58	Printer	2015	Brodher	6,150,000		
59	Flashdisk	2013	-	400,000		
60	Meja kerja pejabat eselon III	2009	-	4,050,000		
61	Meja kerja pejabat eselon IV	2007	-	8,580,000		
62	Meja kerja pejabat eselon IV	2003	-	1,500,000		
63	Kursi kerja	2011	-	3,740,000		
64	Kursi kerja pejabat eselon III	2009	-	1,500,000		
65	Kursi kerja	2007	-			

	pejabat eselon IV			2,235,000		
66	Kursi kerja pejabat eselon IV	1990	-	750,000		
67	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon III	2009	-	7,920,000		
68	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2009	-	3,000,000		
69	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2004	-	750,000		
70	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2002	-	1,250,000		
71	Layar proyektor	2007	-	6,950,000		
72	Layar proyektor	2015	In Focus	6,000,000		
73	Pesawat telephone	2009	-	400,000		
74	Handy talky	2007	-	3,982,000		
75	Facsimile	2009	-	2,250,000		
76	Camera photo micrograph	2013	Sony	2,500,000		
77	Laptop	2016	Hp	6,000,000		
78	Meja Kerja	2016	buatan	4,500,000		
79	Handy Talky	2016	ICOM	3,500,000		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok pada Tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD disusun dengan format seperti dalam pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terciptanya kapabilitas dan kualitas aparatur pada tahun 2015 ini telah sesuai dengan apa yang ditargetkan

sehingga persentase pencapaian kinerjanya hanya 100% dan dikategorikan baik. Jika dibandingkan pencapaian target pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum tercapai sesuai target dengan kategori baik. Adapun faktor utama tidak tercapainya target tersebut adalah keterbatasan anggaran yang menghukum. Jadi peningkatan kapabilitas dan kualitas aparatur Kesbangpol secara komulatif dapat dikategorikan baik. Peningkatan kapabilitas dan kualitas aparatur dapat diukur dengan keikutsertaan dalam kegiatan Pelatihan, Bimtek atau sejenisnya dan juga adanya peningkatan kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok.

2. Capaian terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tahun 2015 ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu dikategorikan dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan kondisi capaian 2011, 2012, 2013 dan 2014 pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana aparatur juga dikategorikan baik, ini diukur dari terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan sangat membantu dalam penyelesaian tugas pada Kantor Kesbangpol tanpa hambatan yang berarti. Ketersediaan Anggaran merupakan faktor utama dalam melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung Kantor Kesbangpol. Dengan ketersediaan anggaran yang baik maka akan dapat dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana secara optimal.
3. Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terhadap siswa SLTA dan masyarakat setiap tahunnya terserap/terlaksana 1000 orang
4. Meningkatnya kesadaran ormas untuk melegalkan Organisasi yang didirikannya
5. Terciptanya dengan baik kerukunan umat beragama di Kabupaten Solok dan telah dibentuknya Forum Keamanan Umat Beragama (FKUB) semenjak tahun 2013
6. Pada RENSTRA lama ditargetkan tidak sesuai dengan jumlah Partai yang ada, sedangkan jumlah partai di Kabupaten Solok

ada 12 partai yang menduduki kursi pada DPRD hanya 10 partai

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilu Kepala Daerah ditargetkan 60 orang sedangkan yang tercapai 112 orang dikarenakan pada Tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Pada Kabupaten Solok terdapat 14 Kecamatan dan tim Monitoring setiap Kecamatan beranggota 4 orang.
8. Perkiraan peningkatan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam setiap pesta demokratis jauh melebihi target ini menerangkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Undang Undang Pemilu telah sukses dilaksanakan dengan pelaksanaan sosialisasi pada Tahun 2014 sebanyak 16 kali dan pada tahun 2015 sebanyak 3 kali.
9. Untuk Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan dana yang tersedia pada DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok

Tabel 2.1 dan 2.2

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesbangpol**

Pengembangan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai tantangan dan peluang yang berbeda dengan pembangunan di sektor fisik. Masih ada anggapan yang mengatakan bahwa pembangunan di bidang ini tidak begitu penting yang tentu saja berpengaruh pada alokasi anggaran karena hasil pembangunan bidang ini tidak langsung kelihatan seperti pada pembangunan sektor fisik, misalnya pembangunan jembatan.

Sebenarnya bidang kesatuan kesatuan bangsa dan politik adalah bidang yang sangat strategis. Stabilitas sosial politik adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pelaksanaan pembangunan. Tanpa stabilitas sosial politik, mustahil pembangunan dapat dilaksanakan. Di sinilah peran strategis Kantor Kesbangpol yang seharusnya dioptimalkan dengan program dan kegiatan yang mendukungnya.

Berdasarkan kondisi umum diatas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok maka, untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, guna pengembangan pelayanan SKPD diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi kekuatan (Strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats). Masing masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **Kekuatan (S)**

- Adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Tanggal 16 Desember 2010.
- Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)

**Kelemahan (w)**

- Kurangnya SDM dalam menunjang kinerja

**2. Lingkungan Eksternal****Peluang (O)**

- Wilayah Kabupaten Solok yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
- Kabupaten Solok berada di Jalur Perlintasan Sumatera
- Kabupaten Solok berdekatan dengan Ibukota Provinsi
- Berkembangnya LSM dan Ormas lainnya di Kabupaten Solok
- Koordinasi dengan KOMINDA, FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM

**Ancaman (T)**

- Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
- Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah dimasyarakat
- Rentannya konflik perbatasan wilayah di Kabupaten Solok

Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik selama ini belum begitu banyak tereksplorasi. Apalagi sebelum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ketika kebencanaan masih diurus oleh Kantor Kesbangpol, sebagian besar anggaran terserap untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Sekarang, dengan sudah adanya BPBD, ada kesempatan untuk mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga peran Kantor Kesbangpol akan lebih strategis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Solok.

Kurangnya minat Organisasi untuk melegalkan Orkemasnya dikarenakan salah satu syarat untuk pengurusan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) adalah adanya akta Notaris pendirian Orkemas. Sedangkan biaya untuk pembuatan akta Notaris sangat menguras keuangan dari Orkemas tersebut.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menjaga stabilitas keamanan, salah satunya dengan melakukan deteksi dini terhadap aliran-aliran yang berindikasi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, melalui Komunitas Intejen Daerah serta Pengawasan Orang Asing untuk itu perlu lebih diberdayakan Forum-Forum yang terbentuk di Kabupaten Solok.

## **BAB III**

### **ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kesbangpol Kabupaten Solok tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Perselisihan antar nagari dan Kabupaten menyangkut tapal batas yang berdampak pada perpecahan antar masyarakat nagari perlu di antisipasi se dini mungkin dan ditangani secara arif oleh daerah.
- b. Adanya aliran kepercayaan terlarang yang masih bergerak secara diam-diam ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Organisasi sosial kemasyarakatan yang ada perlu terdata dan terpantau secara lengkap agar organisasi tersebut terbina dengan baik sehingga dapat menjadi organisasi yang menjadi partner pemerintah.
- d. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan
- e. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi** merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefenisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefenisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rancangan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, bahwa visi Kabupaten Solok adalah **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pernyataan misi sesuai dengan rancangan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Misi Kabupaten Solok adalah :

**Misi Pertama**

Mensukseskan program wajib belajar (wajib) 12 Tahun

**Misi Kedua**

Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.

**Misi Ketiga**

Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana Infrastruktur yang memadai.

**Misi Keempat**

Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah.

**Misi Kelima**

Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan amanat Perda no 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disimpulkan empat pilar pembangunan dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dimana :

Pilar 1 Pendidikan dengan prioritas

- Peningkatan partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan
- Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan

Pilar 2 Kesehatan dengan prioritas

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pilar 3 Ekonomi Kerakyatan dengan prioritas

- Pembudidayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
- Pengembangan pariwisata, UMKM dan investasi dan sektor ekonomi lainnya
- Penguatan kedaulatan pangan
- Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi
- Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran

Pilar 4 Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan prioritas

- Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABS-SBK yang didukung oleh pemerintah nagari yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajarangan
- Pelaksanaan reformasi birokrasi

### **3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Luas wilayah Kabupaten Solok dan merupakan daerah yang berada di Jalur Perlintasan Sumatera dan berdekatan dengan Ibukota Provinsi maka hal ini dapat menimbulkan ancaman akan Kantrantibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga ketahanan bangsa dan kesatuan bangsa. Berdasarkan analisa tersebut maka isu-isu strategis bagi Kesbangpol Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

**Tabel Penentuan Isu-Isu Strategis**

<b>No</b>	<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Isu-Isu Strategis</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang kondusif dan kehidupan berpolitik yang harmonis	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman	Berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pemuda/pemudi, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Solok
		Mewujudkan kehidupan berpolitik yang harmonis	Belum harmonisnya kehidupan politik di masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Koordinasi forum-forum diskusi politik 2. Dukungan kelancaran administrasi bagi partai politik

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2.1 VISI DAN MISI**

**VISI**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovasi serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus mendukung visi dari pemerintah Kabupaten Solok 2016 – 2021 yaitu ” **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah**” untuk mendukung visi pemerintah daerah tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok mempunyai visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG  
KONDUSIF DAN KEHIDUPAN BERPOLITIK YANG HARMONIS”**

Penjelasan Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat kabupaten Solok yaitu meliputi seluruh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Solok.
2. Kondusif, yaitu tenang atau mendukung untuk memberikan hasil yang diinginkan seperti aman, tertib dan damai.
3. Harmonis, yaitu pernyataan rasa dan minat keselarasan, keserasian, seia sekata. Sedangkan kehidupan berpolitik yang harmonis maksudnya adalah seluruh partai politik, organisasi kemasyarakatan seia sekata dalam pembangunan Kabupaten Solok.

## **MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Solok 2016-2021 tersebut, maka dirumuskan Misi Kesbangpol Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman
2. Mewujudkan kehidupan berpolitik yang harmonis

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

### **a. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa dan gejolak politik di daerah yang merupakan potensi untuk tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pencapaian tujuan umum program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat.
2. Mewujudkan kehidupan berpolitik yang harmonis.

### **b. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok adalah merupakan penjabaran dari tujuan dengan indikator sasaran, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat
2. Terwujudnya kehidupan partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang harmonis.

## **2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **a. Strategi**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok diperlukan berbagai strategi, baik strategi internal maupun strategi eksternal, dengan melakukan koordinasi pada seluruh staf workless yang ada di daerah dan pusat. Adapun strategi Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

#### **Strategi** misi pertama

Melaksanakan pelatihan wawasan kebangsaan.

#### **Strategi** misi kedua

Melaksanakan koordinasi dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Memberdayakan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

### **b. Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perlu ditetapkan kebijaksanaan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi wawasan kebangsaan
- b. Sosialisasi pendidikan politik masyarakat
- c. Fasilitasi partai politik, FPK, FKDM, FKUB, PAKEM, POA, dan Tim Penanganan Konflik

**Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang kondusif dan kehidupan berpolitik yang harmonis**

**Misi 1 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman**

**Misi 2 : Mewujudkan kehidupan berpolitik yang harmonis**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	Melaksanakan pelatihan wawasan kebangsaan	Sosialisasi wawasan kebangsaan
Terwujudnya kehidupan berpolitik yang harmonis	Meningkatnya koordinasi dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.	Jumlah koordinasi dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.	Melaksanakan koordinasi dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya	Sosialisasi pendidikan politik masyarakat
			Memberdayakan partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya	Fasilitasi partai politik, FPK, FKDM, FKUB, PAKEM, POA, dan Tim Penanganan Konflik

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama periode 2016 s/d 2021 diperlukan program-program yang dapat menjawab tantangan, permasalahan serta kesinambungan program dan kegiatan yang diperlukan untuk 5 tahun kedepan.

**Rencana Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur guna meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan mobiler
- Pengadaan Kendaraan Roda 4
- Pengadaan Perlengkapan Kantor

- Pengadaan Peralatan Kantor
- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kapabilitas Aparatur khususnya Kantor Kesatuan bangsa dan Politik yaitu dengan mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan/Pelatihan Kompetensi

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan system pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  
Program ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindakan kriminal, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- Fasilitasi rapat koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).
- Peningkatan kerjasama Tim Terpadu Kabupaten Solok dalam penanganan gangguan keamanan.
- Pelaksanaan Intelejensi dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Kepala Daerah
- Penelitian lapangan dan penelitian dokumen untuk pengeluaran SKT

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat dalam menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi aparatur, tokoh masyarakat
- Fasilitasi pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- Fasilitasi pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- Fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- Fasilitasi pemberdayaan Tim Terpadu Penanganan Konflik

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat dalam rangka penataan organisasi sosial kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyuluhan pemberantasan dan pencegahan penyakit masyarakat

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesatuan bangsa, mendemokrasikan parpol, peningkatan peran ormas, pemuda dan organisasi profesi, yang tertuang dalam kegiatan sebagai berikut ;

- Koordinasi Forum-forum diskusi politik
- Dukungan kelancaran administrasi bagi partai politik
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Sosialisasi Undang-undang Pemilu bagi aparatur, Orkemas dan Partai Politik

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**  
**SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode RPJMD serta target capaian indikator Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 6.1

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi sebagaimana yang telah ditetapkan terdahulu. Untuk dapat mencapai visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih banyak hal-hal yang perlu dikerjakan, terutama pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting juga untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Secara umum dapat dikatakan kondisi Ipeleksosbudhankam agama di Kabupaten Solok berada pada kondisi yang stabil, aman, tertib, lancar dan terkendali. Mudah-mudahan kondisi ini dapat dipertahankan dan kita terhindar dari segala macam ancaman bencana, baik bencana alam, kebakaran maupun bencana lainnya yang dapat mengancam stabilitas Kabupaten Solok sehingga masyarakat merasa nyaman tinggal di Kabupaten Solok

Arosuka, Juli 2017  
KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN SOLOK  
**KEPALA**

**JUNAI, S.Sos**  
NIP. 19620617 198612 1 001